

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di seluruh dunia. Sejauh ini, seperti di negara-negara miskin, menghadapi masalah pertumbuhan dan tidak meratanya distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih dialami banyak negara berkembang, tetapi tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin (Todaro, 2015). ASEAN merupakan kawasan regional negara dengan memiliki jumlah populasi penduduk yang banyak dan terbesar ketiga di dunia. Ada banyak negara berkembang di kawasan ASEAN yang menghadapi masalah kemiskinan yang tidak dapat diabaikan. Permasalahan di kawasan ASEAN yang sering muncul dan masih menjadi ciri – ciri negara berkembang seperti sebagian besar penduduk (>70%) bekerja pada sektor pertanian, tingginya angka pengangguran karena besarnya jumlah penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan, kelebihan jumlah penduduk yang menyebabkan tidak terjangkau atau tidak meratanya pelayanan sosial, industrinya berlatang belakang agraris, terutama memanfaatkan hasil kehutanan, pertanian, dan perikanan (industri sektor pertama dan sektor kedua).

Negara Filipina memiliki penduduk sebanyak 103 juta di tahun 2017 dengan jumlah penduduk miskin hampir seperlima total penduduk yaitu sebanyak 23 juta di tahun 2017. Filipina masih menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di ASEAN. Masyarakat miskin mayoritas berdomisili di daerah perdesaan dan daerah rawan bencana. Masyarakat miskin di Filipina berkerja di bidang agrikultur sebagai petani tunggal dengan alat pertanian yang sederhana. Masyarakat miskin di Filipina memiliki pendidikan rendah. Tiga hal tersebut menjadi suatu alasan investor

enggan untuk berinvestasi di daerah-daerah domisili masyarakat miskin sehingga tidak banyak pekerjaan yang tersedia.

Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Krisis keuangan di Tren kemiskinan di Indonesia sejak 2000 hingga sekarang memang mengalami penurunan tetapi penurunannya lambat bahkan cenderung stagnan. Pasar dan informasi masih tidak sempurna, layaknya monopoli dan sejenisnya masih banyak terjadi. Kesenjangan ekonomi pun masih terjadi di Indonesia, dimana mereka yang kaya akan semakin kaya dan mereka yang miskin akan semakin miskin. BPS (2015) menyatakan ditahun 2012 terjadi peningkatan inflasi dikarenakan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi dan kenaikan harga pangan menekan masyarakat miskin karena hampir 65% pendapatan digunakan untuk konsumsi. Pendapatan yang hampir seluruhnya dialokasikan untuk konsumsi akan berdampak pada aspek lain dalam kehidupan masyarakat miskin yang akan kesulitan untuk mengembangkan taraf hidup. Kesulitan yang muncul adalah tidak ada tabungan dan mendapatkan kredit. Masyarakat miskin menjadi rentan terhadap *financial shocks*. Menurut Dermigue-kent (2012) masyarakat akan tetap miskin apabila tidak menghilangkan financial barriers yang mengikat kehidupan mereka. Salah satu permasalahan financial barriers adalah minimnya akses dan penggunaan pada layanan keuangan formal. Perkembangan sektor keuangan menjadi kebijakan yang tepat untuk menghubungkan akses dan penggunaan lembaga keuangan pada masyarakat miskin.

Negara Malaysia merupakan negara berkembang ASEAN yang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Tingkat kemiskinan di Malaysia menduduki merupakan tingkat kemiskinan terendah di ASEAN nomor dua setelah Thailand sebesar di tahun 2016 (Worldbank, 2017). Namun masyarakat miskin di Malaysia banyak hidup di daerah pedesaan. Pemerintah Malaysia melakukan beberapa kebijakan untuk menekan angka kemiskinan di desa, selain meningkatkan pendidikan,

pemerintah juga melakukan kebijakan inklusi keuangan agar masyarakat miskin mampu menggunakan layanan keuangan formal untuk meningkatkan tingkat hidupnya.

Negara Vietnam merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang cukup padat, di ASEAN Vietnam berada di urutan ke tiga penduduk terbanyak. Tingkat kemiskinan pada negara tersebut dapat dikatakan lebih rendah dibandingkan negara Indonesia. Namun kemiskinan di Vietnam paling banyak terdapat pada daerah pedesaan, hal tersebut yang membuat negara Vietnam lebih cepat dan tanggap dalam mengurangi kemiskinan dengan pemerintah memberikan subsidi pupuk, transportasi, listrik dan juga kebijakan yang dibuat. Tujuan bantuan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi, barulah mereka mulai melakukan ekspor.

Negara Kamboja dan Myanmar masih masuk kedalam negara yang berkembang dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi karena adanya pendapatan yang rendah, dan inflasi yang masih tinggi. Selain itu, dana negara tidak berkembang dan mencukupi pertumbuhan yang berkembang pesat. Meskipun begitu kenyataan lain menghantui Kamboja. Dimana angka kematian bayi di negara ini masih terlalu tinggi dan hampir 70% penduduk masih hidup dipedesaan dengan bekerja sebagai petani tradisional.

Thailand adalah negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling rendah di ASEAN dengan tingkat kemiskinan sebesar 8.1% pada tahun 2017 7,6 juta orang hidup diatas garis kemiskinan nasional tetapi rawan kembali masuk jatuh ke garis kemiskinan. Masyarakat miskin yang hidup di Thailand, Indonesia, Malaysia , Filipina Vietnam, Kamboja, dan Myanmar kebanyakan berada di daerah pedesaan dengan akses yang sulit dalam meraih layanan keuangan formal.

Target pengentasan kemiskinan dengan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi sangat tinggi dalam konteks kepentingan umum (kesejahteraan) dan pembangunan manusia (*human development*) serta penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*) (R.Chambers,1983). Mengevaluasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan kesejahteraan dengan melihat angka harapan hidup. Selain itu, kemiskinan dapat dikurangi melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kesempatan kerja dengan memperluas lapangan pekerjaan . Pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.

Masalah masyarakat miskin adalah minimnya akses terhadap layanan keuangan formal yang terlihat dari kepemilikan akun bank yang terbatas pada masyarakat miskin (Esquivias et al., (2021). Masyarakat yang tidak memiliki akun bank terbukti mengalami kesulitan pada likuiditas dan pembayaran. Kesulitan dalam likuiditas akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti kesulitan membeli kebutuhan pokok yang menyebabkan masyarakat miskin harus berhutang dan meminjam dana kepada layanan non-formal, yang dapat merugikan masyarakat miskin dikemudian hari. Masyarakat yang memiliki akun bank mampu meningkatkan tabungan, konsumsi dan investasi sehingga pemenuhan konsumsi akan terpenuhi (Erlando et al., 2020). Sektor keuangan dijadikan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian negara karena memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan perekonomian (King dan Levine, 1993).

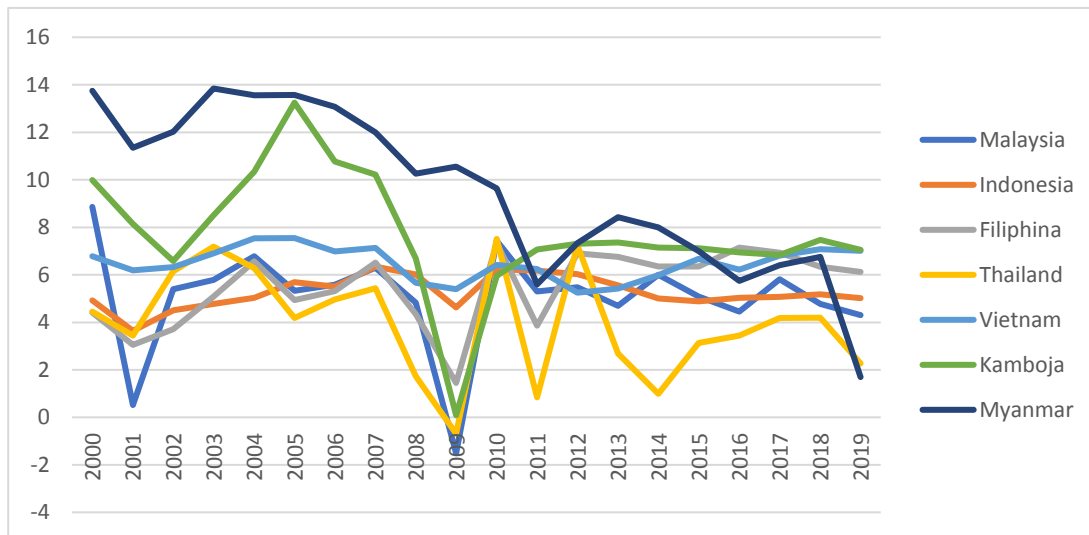
Berdasarkan tinjauan literatur, tingkat perkembangan sektor keuangan berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan (Michálek dan Výboštok, 2019). Hal ini memiliki hubungan jika kredit swasta merupakan indikator utama yang

digunakan untuk mengukur *financial developmnet* lembaga keuangan di suatu negara tertentu. Hal tersebut digunakana untuk mendorong investasi swasta luar negeri dan dalam kredit swasta memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian Nasional pada suatu negara sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha – usaha yang baru. Semakin tinggi rasio kredit swasta terhadap PDB suatu negara tertentu, semakin baik *financial development* lembaga keuangan negara tersebut. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, beberapa hasil menunjukkan hasil yang bertentangan (Sehrawat dan Giri, 2016) menyatakan manfaat pembangunan sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi belum merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Masalah tersebut akan membuat kemiskinan menjadi tinggi dan harus segera diselesaikan dengan menjadi salah satu prioritas utama dalam melahirkan berbagai kebijakan dapat diatasi dengan kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemisknan dan ketimpangan pendapatan adalah perkembangan sektor keuangan dengan memberikan bantuan modal dalam usaha seperti pemberian kredit. Perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam penyaluran kredit memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian Nasional pada setaip negara sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha – usaha yang baru. Dalam kredit perbankan yang berperan dalam meningkatkan konsumsi salah satunya. Dengan adanya *financial development* merupakan strategi kebijakan untuk menghubungkan masyarakat miskin dengan akses layanan keuangan formal dan memiliki efek menguntungkan yang signifikan untuk individu, ekonomi dan politik pada negara yang menggunakan kebijakan tersebut (Dermiguc-Kunt, 2012). Kebijakan tersebut semakin diperhatikan khususnya tahun 2000an karena berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi negara sehingga berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan juga ketimpangan pendapatan (Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine 2007).

Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN selama dua dekade lebih. Perekonomian di negara ASEAN mengalami tingkat pertumbuhan yang stabil setelah tahun terjadinya guncangan krisis moneter. Pada tahun 1999 negara Kamboja mengalami peningkatan menjadi 12,71%. Pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN yang meningkat semakin baik dan cukup stabil seperti, pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia, Thailand dan Indonesia yang perlahan membaik di tahun 2000.



Gambar 1. 1

Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-7 (%) 2000 - 2019

Sumber: World Bank (2021)

Pertumbuhan ekonomi diyakini dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun, pengaruh ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Kondisi distribusi pendapatan, jumlah penduduk, dan urbanisasi memiliki implikasi penting untuk menentukan dampak antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan

(Ingratubun *et al.*, 2019). Kantong kemiskinan banyak ditemui di daerah pedesaan dan sebaliknya kemiskinan juga berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi.

Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses dan layanan jasa keuangan memperlihatkan perkembangan sektor keuangan pada sistem belum berfungsi dengan optimal. Suatu sistem keuangan dikatakan berfungsi dengan optimal jika dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu. Jika sebagian besar masyarakat sudah dapat memanfaatkan fasilitas jasa keuangan, dampak terhadap suatu perekonomian akan sangat besar. Sektor keuangan merupakan salah satu dari tulang punggung ekonomi negara karena memiliki peranan yang vital dalam mendukung kegiatan ekonomi (Setiawan, 2015). Pembangunan sektor keuangan dapat dianggap sebagai elemen strategis dalam kerangka kebijakan pembangunan suatu negara. Dengan perkembangan sektor keuangan, diharapkan fungsi intermediasi keuangan (melalui Lembaga keuangan dan pasar keuangan) dapat berkembang secara optimal (Levine, 2015). Hal ini dianggap sebagai fenomena peningkatan uang beredar atau kredit bank yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, dan peningkatan transaksi keuangan yang mengarah pada peluang akumulasi modal, distribusi pendapatan, dan konsumsi yang lancar (Boukhatem, 2016).

Financial development diyakini sebagai salah satu kunci dalam pengurangan ketimpangan antara golongan si kaya dan si miskin. Dengan munculnya *Financial development*, terdapat harapan yang tinggi terhadap upaya peningkatan akses masyarakat dan akses layanan keuangan yang lebih luas. Teori pengaruh *financial development* terhadap distribusi pendapatan menawarkan prediksi yang positif, dikarenakan sektor keuangan dapat mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan (Galor dan Zeira, 1993).

Financial development sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan dalam akses, efisiensi, stabilitas, dan liberalisasi, dengan fokus khusus pada tingkat pendapatan dan kualitas lembaga. Hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat miskin karena terjadinya pertumbuhan agregat dan perubahan distribusi pendapatan yang akan meningkatkan akses permodalan dalam usaha untuk meningkatkan output agregat sehingga terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan akses perbankan ini diharapkan mampu Mendorong partisipasi seluruh masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan membahas “Pengaruh *Financial Development* Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-7”. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh *financial development* dalam pengurangan kemiskinan. Sehingga dengan demikian pemerintah dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan di pada setiap negara agar pengurangan kemiskinan mencapai target yang telah ditetapkan.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Terdapat penelitian di negara berkembang mengenai *financial development*, ketimpangan pendapatan, terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan di negara berkembang seperti India, Bangladesh dengan menggunakan metode analisis ARDL mengungkapkan hubungan jangka panjang yang kuat antara pembangunan keuangan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan. Hasil menunjukkan pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi membantu dalam pengurangan kemiskinan (Sehrawat dan Giri, 2018, dan Uddin *et al.*, 2014).

Tsaurai (2020) melakukan penelitian dari negara BRICS menggunakan alat analisis OLS dan FMOLS. Hasil penelitian menunjukkan dampak pembangunan keuangan dan FDI terhadap pengentasan kemiskinan adalah cukup jelas dalam

sebagian besar kasus saling melengkapi antara pembangunan keuangan dan FDI meningkatkan pengentasan kemiskinan.

Penelitian yang telah dilakukan sejauh ini belum melibatkan kawasan Asia Tenggara. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu unit analisis dengan menggunakan konteks wilayah ASEAN-7 (Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar) yang berdasarkan populasi penduduk tertinggi. Penelitian ini menggunakan periode yang lebih baru yaitu meneliti tahun 2000 - 2019. Penggunaan alat ekonometrika yang juga berbeda juga dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode panel FEM. Variabel yang digunakan dalam studi ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu terutama variabel *domestic credit private of gdp* karena kredit memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian Nasional pada setiap negara sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha – usaha yang baru. Sehingga dapat melihat pengaruh antar variabel independen terhadap dependen.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *financial development* terhadap tingkat kemiskinan yang didasarkan oleh, kemudahan akses permodalan dijelaskan oleh *domestic credit private of GDP*, pertumbuhan ekonomi , *trade openness*, tingkat inflasi, terhadap pengurangan kemiskinan di negara ASEAN-7 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam) pada periode 2000 – 2019.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Menggunakan metode data panel statis, yaitu gabungan antara data cross section dan data time series

dengan model FEM yang dipilih dari regresi panel. Penelitian ini berfokus pada menganalisis tingkat signifikansi hubungan antara variabel pembangunan keuangan yang tercermin dari jumlah kredit domestik untuk sektor swasta, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, inflasi dan kemiskinan di tujuh negara berkembang (Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar) di ASEAN pada periode 1994-2019.

Data diolah dengan menggunakan program perangkat lunak STATA 14. Analisis pengaruh financial development dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrik data panel statis. Hasil pada penelitian ini *financial development*, keterbukaan perdagangan dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada tujuh negara di ASEAN akan tetapi pada variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat memperburuk kemiskinan jika tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan yang merata.

1.5 Kontribusi Riset

Kontribusi penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh perkembangan sektor keuangan terhadap tingkat kemiskinan di negara ASEAN-7, serta untuk menambah referensi penelitian menggunakan metode FEM dengan data panel. Berkontribusi dalam meningkatkan hasil penelitian terkait perkembangan sektor keuangan terhadap tingkat kemiskinan di negara-negara ASEAN-7, karena masih minimnya penelitian terkait perkembangan sektor keuangan dalam penanggulangan tingkat kemiskinan di ASEAN-7. Berkontribusi untuk mengetahui masyarakat dalam memanfaatkan layanan peminjam modal usaha seperti perbankan atau lkm yang potensial pendorong pertumbuhan. Dengan terjadinya perkembangan sektor keuangan akan membuka akses masyarakat miskin terhadap upaya peningkatan kegiatan ekonomi dan dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga

pemerintah dapat merumuskan strategi yang tepat dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara ASEAN.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Bab 1 Pendahuluan terdiri dari latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 Tinjauan Pustaka terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian. Bab 3 Metode Penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, penjelasan data (jenis, sumber, dan alur pemilihan data), model empiris, definisi operasional variabel dan teknik analisis yang digunakan. Bab 4 Pembahasan terdiri dari tinjauan umum penelitian, deskripsi statistik, deskripsi hasil penelitian, pembahasan, dan uji robustness. Bab 5 Kesimpulan dan Saran terdiri dari kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.